BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dengan diterapkannya pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Digitalisasi layanan publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa ancaman siber (*cyber threats*) yang dapat mengganggu sistem pemerintahan, mencuri data publik, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas serangan siber terhadap instansi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan pemberitaan dari (Riki, 2025), tercatat ada 19.701 insiden siber terjadi pada bulan September 2025 di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kabid Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menegaskan bahwa peningkatan jumlah serangan sejalan dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di sektor publik. Sucilianita mengatakan bahwa serangan tersebut meliputi *phising*, penyebaran *malware*, hingga kebocoran data yang kini semakin menyasar instansi pemerintah daerah. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sistem pertahanan

digital, dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih waspada dan memperkuat sistem keamanan siber mereka.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa isu keamanan siber telah menjadi agenda strategis daerah yang tidak bisa diabaikan. Di tingkat kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika (selanjutnya ditulis Diskominfo) memiliki peran penting sebagai pengelola infrastruktur digital pemerintahan. Di Kabupaten Tabalong, Diskominfo bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi pemerintahan, jaringan komunikasi data, website resmi pemerintah daerah, dan berbagai aplikasi pelayanan publik digital. Dengan tanggung jawab besar ini, Diskominfo Tabalong berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan ancaman siber di lingkungan pemerintahan daerah.

Dari sudut pandang ilmu administrasi publik, peran Diskominfo Tabalong dalam menghadapi ancaman siber dapat dianalisis melalui perspektif manajemen strategis sektor publik, di mana strategi merupakan serangkaian langkah terencana untuk mencapai tujuan organisasi di tengah tantangan lingkungan yang dinamis. Proses ini meliputi tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem pemerintahan digital. Selain itu, strategi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, yang menekankan pentingnya pendekatan keamanan siber yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam

menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Regulasi ini menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, serta penguatan pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan terhadap insiden siber. Selain itu, Perpres ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan manajemen krisis siber untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas layanan publik, serta menjamin keberlangsungan sistem elektronik dan infrastruktur informasi strategis.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ancaman siber terhadap sistem pemerintahan daerah semakin meningkat seiring dengan masifnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan publik yang cepat dan digital, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan data, sistem, dan informasi publik yang dikelolanya. Apabila strategi keamanan siber tidak dirancang dan dijalankan secara optimal, maka risiko kebocoran data, gangguan layanan publik, hingga penyebaran *malware*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali dan menganalisis strategi Diskominfo Tabalong dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi upaya penguatan keamanan digital pemerintah daerah di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam mengadapi ancaman siber di Kabupaten Tabalong?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Diskominfo Kabupaten Tabalong dalam menghadapi ancaman siber.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka didapatkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang tata kelola keamanan informasi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kebijakan keamanan siber di tingkat daerah, serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait strategi keamanan digital dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam memperkuat

strategi keamanan siber yang telah dijalankan, termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan risiko, dan pengembangan sistem keamanan digital yang lebih adaptif. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi data publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah.